



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDRIS RAHIM
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 51969

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.515.000.000**

1. Tanah Seluas 3914 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
2. Tanah Seluas 3990 m2 di BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
3. Tanah Seluas 9210 m2 di BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 669 m2/523 m2 di GORONTALO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/210 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 4013 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
7. Tanah Seluas 1113 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 849 m2/720 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/350 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/250 m2 di KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 375.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER JEEP Tahun 2007, HIBAH



DENGAN AKTA Rp. 375.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	205.625.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.521.586.931
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.617.211.931
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.617.211.931

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Desember 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.